

Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat

Puji Lestari, Agung Prabowo, dan Arif Wibawa
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari no 2 Yogyakarta 55281
Telp 0274-485268, Fax. 0274-487147, email: pujilestariginting@yahoo.co.id

Abstract

Various disasters that had occurred in Indonesia had grown national awareness of the importance of disaster risk reduction. The issue of disaster management is one of the nine national development priorities in 2010-2014, aimed to build strong Indonesian society in facing disaster. Related with this issue, the study of disaster communication management is necessary, especially during emergency response time, in order to accelerate the process of reconstruction and rehabilitation. This research aims to describe and evaluate the mount Merapi 2010 disaster communications management in Yogyakarta. Data were collected by interview, observation, documentation, and Focus Group Discussion (FGD) with sources, among others, officials and members of the Disaster Risk Management Forum DIY, NGOs, donors, volunteers, and all associated with disaster management in Merapi. The research results showed; Disaster communication management of Merapi is good enough. It can be seen from the planning process which includes Contingency Plan. Organization conducted by the National Agency for Disaster Management (BNPB), Provincial Government of Yogyakarta, Sleman Government, Regional Disaster Management Agency (BPBD) and Disaster Risk Reduction Forum (FPRB). In the implementation, coordination routinely involved parties such as BNPB, FPRB, local government, and even several communication media in Yogyakarta. The process of evaluation by BNPB, local government, and FPRB was done regularly.

Abstrak

Berbagai kejadian bencana di Indonesia telah menumbuhkan kesadaran nasional tentang pentingnya pengurangan resiko bencana. Isu manajemen bencana menjadi salah satu dari sembilan prioritas pembangunan nasional pada 2010-2014, diarahkan untuk membangun masyarakat Indonesia yang tangguh dalam menghadapi bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, kajian tentang manajemen komunikasi bencana sangat dibutuhkan terutama pada saat tanggap darurat, guna mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengevaluasi manajemen komunikasi bencana gunung Merapi 2010 di DI. Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan narasumber, antara lain; pengurus dan anggota Forum Penanggulangan Resiko Bencana DIY, Lembaga Swadaya Masyarakat, pendonor, relawan, dan semua yang terkait dengan manajemen penanggulangan bencana di Merapi. Hasil penelitian menunjukkan; manajemen komunikasi bencana di Merapi sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari perencanaan sudah dilakukan dengan pembuatan Rencana Kontigensi. Pengorganisasian dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Daerah Provinsi DIY, Pemda Sleman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB). Pada pelaksanaan, ada koordinasi secara rutin pihak-pihak terkait seperti BNPB, FPRB, Pemda, bahkan berbagai media komunikasi di DIY. Proses evaluasi oleh BNPB, Pemda, dan FPRB berjalan rutin.

Kata kunci : manajemen, komunikasi, bencana, merapi

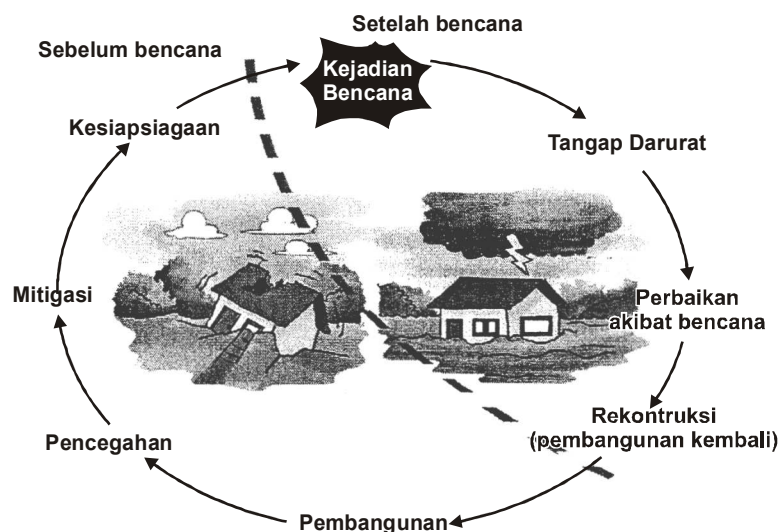
Pendahuluan

Indonesia sangat rentan terhadap ancaman berbagai jenis bencana alam. Hal ini terlihat pada ciri-ciri sebagai berikut (Asmadi, 2010); (1) Memiliki 129 gunung berapi aktif dan 70 gunung diantaranya potensial dikategorikan sangat berbahaya; (2) Memiliki 5.590 sungai utama yang potensial banjir; (3) Memiliki 17.508 pulau \pm 440 suku bangsa dan \pm 13.000 dialek; (4) Berada di antara dua benua dan dua lautan besar, potensial terjadi angin; (5) Memiliki pantai; 81.487 km = 2 x panjang keliling bumi.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia merupakan negeri yang rawan bencana alam dan bencana sosial. Tahun demi tahun negeri ini tidak lepas dari bencana. Kasus tsunami Aceh tahun 26 Desember 2004 yang menewaskan nyawa manusia hingga 228.432 jiwa, tsunami Nias 2005, gempa di DIY dan Jateng 27 Mei 2006 yang menghilangkan nyawa sekitar 6000 orang dan lebih 100.000 rumah hancur. Tanggal 30 Oktober 2009 lebih dari 1000 orang tewas dalam gempa di Padang Sumatera Barat (Arif, Ahmad, 2010). Gunung Sinabung meletus pada Sabtu 28 Agustus 2010, jumlah pengungsi mencapai 27,489 jiwa (Dokumen Kominfo Kabupaten Karo, 8 September 2010), disusul Merapi meletus 26 September 2010 dengan kerusakan dan kerugian diperkirakan sebesar 2,1 trilyun rupiah, korban meninggal 277 jiwa (<http://bencana.bappenas.go.id/imdff/renaksi-merapi>, diakses 9 Mei 2012).

Hal ini memperlihatkan banyak masalah terkait dengan penanganan korban manusia, harta benda, kerusakan lingkungan, pranata sosial dan konflik sosial yang bisa mengarah ke disintegrasi bangsa. Cara berpikir warga masyarakat dan manajemen pemerintah tidak banyak berubah. Proses mitigasi masih tersengal-sengal tak mampu mengikuti ritme bencana yang menyebar dengan pesat. Berbeda dengan warga Jepang yang sangat sadar akan ancaman gempa dan tsunami, bahkan ketika tengah malam harus dievakuasi, mereka sudah siap melakukannya dengan cepat (Arif, Ahmad, 2010:22).

Menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (19 Juli 2012), berbagai kejadian tersebut telah menumbuhkan kesadaran nasional tentang pentingnya pengurangan resiko bencana. Pada tahun 2007, Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, diikuti pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Isu manajemen bencana menjadi salah satu dari Sembilan prioritas pembangunan nasional pada 2010-2014, yang diarahkan untuk membangun masyarakat Indonesia yang tangguh dalam menghadapi bencana. Berkaitan dengan prioritas pembangunan nasional tersebut, maka penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis manajemen komunikasi bencana Merapi 2010 di Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar 1.1 Model Pengelolaan Bencana
Sumber: Aditya, Barry, dkk; (2009:20)

Model siklus bencana menggambarkan proses manajemen bencana. Manajemen bencana yaitu seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi orang-perorangan atau komunitas yang berisiko terkena bencana untuk menghindari, mengendalikan risiko, mengurangi, menanggulangi maupun memulihkan diri dari dampak bencana. Pengurangan resiko bencana sangat terkait dengan pengelolaan bencana. Menurut Adhitya, Barry, dan kawan-kawan (2009:21) model siklus memandang bencana sebagai kejadian-kejadian berurutan dengan titik berat pada saat seketika, sebelum, dan sesudah kejadian bencana.

Model siklus manajemen bencana yang berlangsung menunjukkan bahwa sebelum bencana datang diperlukan kesiapsiagaan, mitigasi, dan pencegahan. Setelah bencana datang diperlukan penanganan darurat (tangap darurat), rehabilitasi (perbaikan akibat bencana), dan rekonstruksi (pembangunan kembali). Menurut Ramli, Soehatman (2010:28) manajemen bencana merupakan upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan.

Manajemen komunikasi bencana merupakan upaya yang komprehensif untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana dengan mengelola proses produksi pesan-pesan atau informasi tentang bencana, penyebaran pesan dan penerimaan pesan dari tahap prabencana, saat terjadi bencana dan pascabencana.

Kajian tentang manajemen komunikasi bencana sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain; Lestari, Puji (2007); Badri, Muhammad (2008); Nugroho, Heru (2008); Lestari, Puji, Susilastuti, Hendariningrum, Retno (2009); Ramli, Soehatman (2010), Junaedi, Fajar (2011), Noviani, Ratna (2012), dan Hidayat, Rahmat (2012). Menurut hasil penelitian Lestari, Puji (2007) tentang Manajemen Komunikasi Bencana Gempa di Kecamatan Gantiwarno, manajemen komunikasi bencana adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi atas berbagai kebijakan pemerintah terkait pengelolaan bencana (dalam hal ini bencana gempa bumi tahun

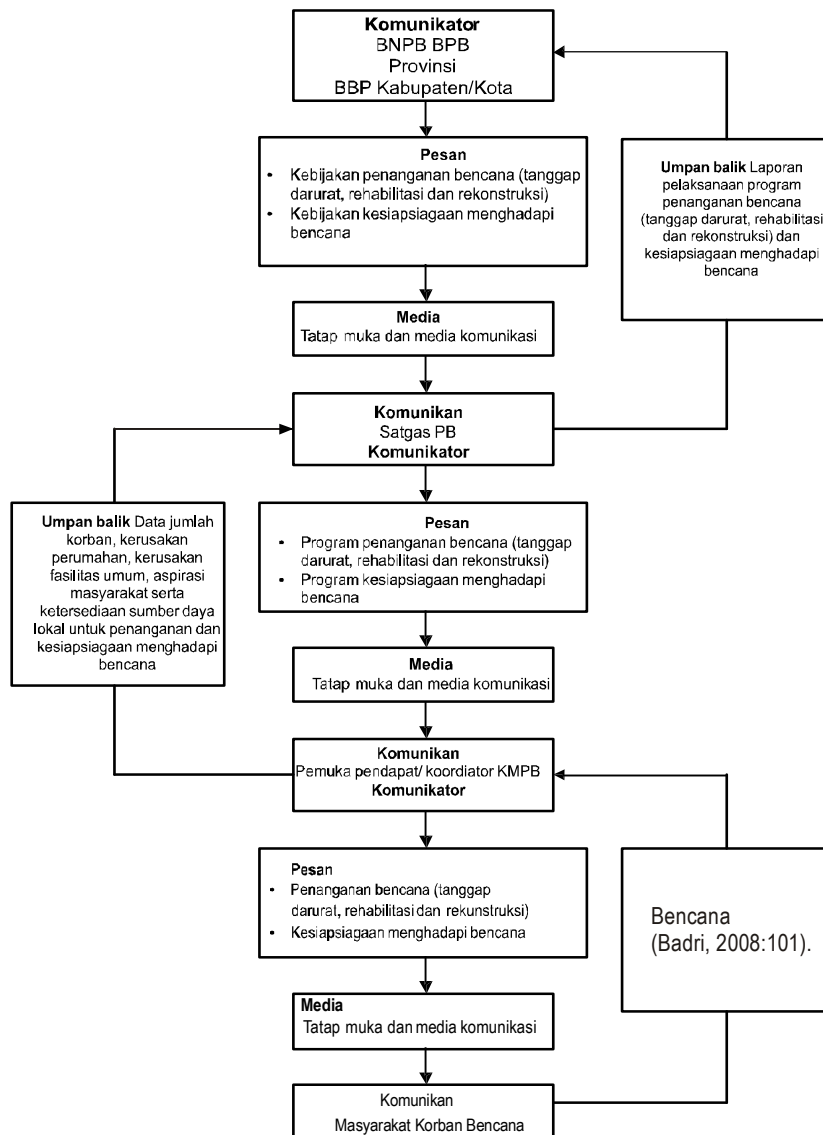
2006). Hasilnya ditemukan bahwa manajemen komunikasi bencana gempa 2006 di Gantiwarno saat itu kurang optimal, terlihat dari kurang adanya perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta evaluasi, sehingga banyak korban yang meninggal, sakit, stres, dan banyak hal kurang terurus, akibatnya konflik pun banyak terjadi di masyarakat, bahkan antar aparat pemerintah.

Terkait pengelolaan bencana menurut Nugroho, Heru (2008:2) upaya melakukan investigasi atas wilayah yang rawan bencana memerlukan kerjasama dan koordinasi antar berbagai institusi pemerintah, karena tanpa adanya koordinasi (komunikasi) maka upaya penanganan dampak bencana hanya sekedar reaktif semata.

Lestari, Susilastuti, dan Hendariningrum (2009) mengkaji tentang manajemen konflik komunikasi bencana gempa di Bantul 2006. Hasilnya terdapat banyak konflik akibat bencana gempa tersebut, baik konflik intrapersonal, antarpersonal, dan kelompok, inter dan antar kelompok masyarakat, maupun aparat pemerintah dengan masyarakat. Manajemen komunikasi yang ditempuh menggunakan nilai-nilai budaya Jawa atau kearifan lokal, yaitu antara lain *guyup rukun*, *gotong-royong*, dan lain-lain.

Badri, Muhammad (2008) juga meneliti tentang manajemen komunikasi bencana gempa di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Penanggulangan bencana yaitu respons terhadap bencana yang meliputi kegiatan penanganan bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Komunikasi berperan penting dalam penanggulangan bencana, terutama untuk menyinkronkan kebijakan pemerintah dan program lembaga non pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Sedangkan komunikasi dengan masyarakat korban bencana untuk mempercepat proses penanggulangan bencana dengan melibatkan sumber daya lokal terutama pemuka pendapat. Badri menemukan manajemen komunikasi bencana partisipatif dalam pengelolaan bencana gempa di Bantul, dijelaskan melalui gambar 1.

Menurut Junaedi, Fajar (2011:213) komunikasi dalam konteks bencana khususnya komunikasi penyiaran, berperan penting dalam menyebarkan informasi bencana kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah (PP)



Gambar 2. Manajemen Komunikasi Bencana
Sumber: Badri, Muhammad, (2008: 101)

Nomor 50 tahun 2005, lembaga penyiaran swasta wajib menyebarluaskan informasi peringatan dini yang berasal dari sumber resmi pemerintah tentang kemungkinan terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan mengakibatkan kerusakan harta benda milik warga. Dalam hal bencana nasional, lembaga penyiaran swasta wajib menyebarluaskan informasi dari sumber resmi pemerintah, yang berkaitan dengan penanganan bencana fase tanggap darurat. Dalam realitanya peran media tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil penelitian Noviani, Ratna (2012:3) menunjukkan bahwa program acara *Breaking News* di Stasiun Metro TV tentang bencana Merapi 2010 cenderung memindahkan realitas objektif dari sebuah berita menjadi sebuah

tontonan belaka. Ada tiga konstruksi kisah yang dimunculkan, yaitu erupsi merapi sebagai *disrupting moment*, *panic moment*, dan *uncertain moment*.

Berbagai informasi dari media massa memengaruhi kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Penelitian tentang kesiapan masyarakat Yogyakarta dalam menghadapi bencana alam dilakukan oleh Hidayat, Rahmat (2012: 105-133). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat Yogyakarta dalam menghadapi bencana terkait dengan pemaknaan masyarakat tentang bencana dari aspek-aspek: konsep diri, *world-view*, nilai-nilai budaya dan keyakinan yang dimiliki masyarakat. Hal ini menuntut penyesuaian strategi komunikasi

dengan manajemen komunikasi bencana yang sesuai dengan karakter masyarakat Yogyakarta.

Beberapa kajian tersebut mempertegas bahwa manajemen komunikasi bencana merupakan aktivitas yang sangat penting dan harus direncanakan guna mengantisipasi adanya bencana. Hal ini didukung oleh Ramli, Soehatman (2010: 27) bahwa mengelola bencana tidak bisa dilakukan secara dadakan namun harus terencana dengan manajemen yang baik sebelum terjadi bencana. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya penetapan kebijakan pembangunan terkait pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Gambar 2 menjelaskan proses komunikasi penanggulangan bencana diawali dengan penyampaian pesan-pesan kebijakan penanggulangan bencana pemerintah melalui BNPB. Secara struktural, kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada BPBD Provinsi hingga BPBD kabupaten atau kota. Di tingkat operasional, pesan-pesan tersebut disampaikan kepada Satgas PB melalui rapat koordinasi dan media komunikasi penanggulangan bencana. Satgas PB yang terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat kemudian merencanakan kegiatan komunikasi penanggulangan bencana agar kebijakan tersebut diterima masyarakat. Untuk kelancaran komunikasi dan pelibatan sumber daya lokal, dilakukan koordinasi dengan pemuka pendapat atau koordinator Komunitas Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB).

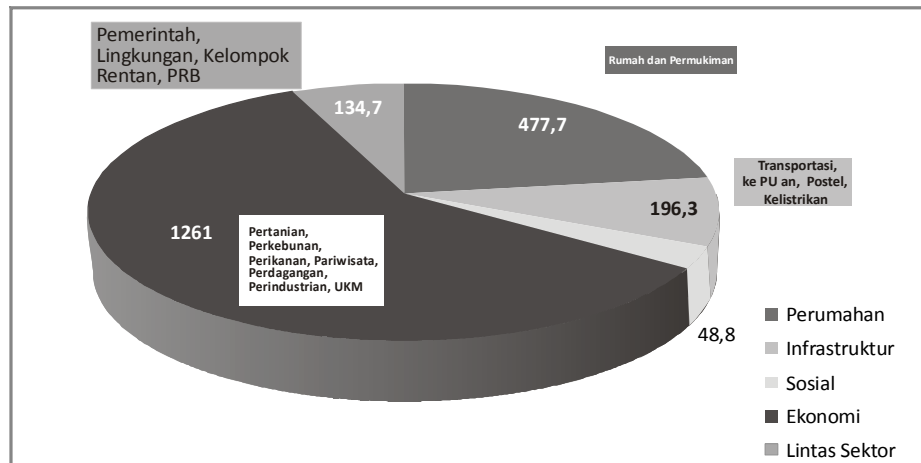
Pemuka pendapat kemudian menyampaikan program penanggulangan bencana kepada masyarakat melalui komunikasi tatap muka dalam rapat kelompok masyarakat. Melalui rapat kelompok, kebijakan dan program penanggulangan bencana didiskusikan untuk mendapatkan respons dari masyarakat. Respons dalam kondisi darurat berupa data jumlah korban, kerusakan perumahan, kerusakan fasilitas umum dan kebutuhan dasar masyarakat. Respons tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu data kerusakan perumahan dan fasilitas umum. Sedangkan respons kesiapsiagaan berupa ketersediaan sumber daya lokal untuk menghadapi bencana.

Respons masyarakat tersebut kemudian disampaikan kepada Satgas PB agar dapat disinergikan dengan kebijakan dan program pe-

nanganan bencana BNPB. Dengan model komunikasi tersebut masyarakat dilibatkan secara aktif dalam penanggulangan bencana melalui pelatihan dan penyuluhan. Komunikasi partisipatif ini melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Komunikasi penanggulangan bencana partisipatif berdampak pada keberhasilan program penanggulangan bencana karena pelaksanaan seluruh proses kegiatan dilakukan masyarakat dengan tetap mengacu pada tujuan dan ketentuan dasar pelaksanaan program BNPB. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan dapat dipertanggungjawabkan, karena setiap langkah dan kegiatan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Manajemen komunikasi bencana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaturan penanggulangan masalah bencana yang melibatkan proses komunikasi, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, pendonor, dan lembaga swadaya masyarakat. Komunikasi atau koordinasi penanggulangan bencana sangat diperlukan untuk memperoleh tujuan yaitu agar penanganan korban bencana berjalan secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Guna memperoleh efektifitas dan optimalisasi sumberdaya diperlukan persyaratan tertentu antara lain; (1) Komunikasi berbagai arah dari berbagai pihak yang dikoordinasikan; (2) Kepemimpinan dan motivasi yang kuat di saat krisis; (3) Kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak; (4) Koordinasi yang harmonis. Keempat syarat tersebut dipadukan untuk menyusun; Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penanggulangan Bencana. Koordinasi memerlukan; (1) Manajemen penanggulangan masalah bencana yang baik; (2) Adanya tujuan, peran dan tanggung jawab yang jelas dari organisasi; (3) Sumber daya dan waktu yang akan membuat koordinasi berjalan; (4) Jalannya koordinasi berdasarkan adanya pertukaran informasi dari berbagai sumber informasi yang berbeda (Lestari, Puji, 2007).



Gambar 3. Perkiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian akibat erupsi Merapi menurut sektor per 31 Desember 2011

(Sumber : Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwana X, 2012).

Tersedianya informasi, semakin mudahnya akses, luasnya sumber informasi, dan mudahnya penyebaran informasi bencana, dapat mengubah harapan masyarakat dan meningkatkan kebutuhan memperoleh ketrampilan menghadapi bencana alam (Badan Informasi Publik, Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, 2008:71).

Penelitian ini terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, hal-hal yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud dalam UU Penanggulangan Bencana Nomor 24 tahun 2007 Pasal 33 huruf b (www.dpr.go.id akses tanggal 27 Desember 2010) meliputi; (a) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; (b) Penentuan status keadaan darurat bencana; (c) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (d) Pemenuhan kebutuhan dasar; (e) Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan (f) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pada tahap penilaian kondisi darurat dilakukan suatu proses mengumpulkan informasi atau data yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya petugas akan menganalisis situasi untuk menentukan dan menilai kondisi-kondisi korban apakah rusak ringan, sedang, atau berat serta jumlah yang meninggal, sakit parah, ringan, dan sebagainya. Pada tahap ini dilakukan proses komunikasi antara petugas dengan masyarakat korban di lokasi bencana, komunikasi dengan aparat pemerintah setempat, dan pihak-pihak terkait

untuk melakukan monitoring dan refleksi yang berlangsung terus-menerus guna membantu perencanaan program yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat korban.

Menurut Badri, Muhammad (2008:32); bantuan darurat disebut sebagai upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, perlindungan, kesehatan, sanitasi dan air bersih. Menurut UNDP (1992: 91-93) beberapa hal yang termasuk pada masa tanggap darurat berkaitan dengan bencana alam mendadak adalah; (1) Evakuasi termasuk relokasi dari zona-zona beresiko ke lokasi yang lebih aman; (2) Mencari dan menyelamatkan (SAR), yaitu proses pengidentifikasian lokasi korban bencana yang mungkin terjebak atau terisolasi dan membawanya ke tempat aman, serta memberikan perawatan medis; (3) Pengkajian pasca bencana yang bertujuan untuk memberikan gambaran singkat dan jelas dari situasi pasca bencana, untuk mengidentifikasikan keperluan-keperluan bantuan dan mengembangkan strategi-strategi pemulihan; (4) Bantuan emergensi, yaitu penyediaan bantuan materi dan bantuan medis emergensi berdasarkan peri kemanusiaan yang diperlukan untuk menyelamatkan dan mengamankan kehidupan manusia. Bantuan ini memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk perawatan kesehatan dan obat-obatan, tempat berlindung, pakaian, air dan makanan (termasuk sarana untuk menyiapkan makanan); (5) Kapasitas dan fasilitas

logistik untuk pengiriman bantuan. Pelayanan suplai yang terorganisir dengan baik penting untuk menangani pembelian atau penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman suplai bantuan untuk didistribusikan kepada korban bencana; (6) Komunikasi dan manajemen informasi. Ada dua aspek komunikasi dalam bencana. Pertama adalah perlengkapan yang penting untuk arus informasi, seperti radio, telepon dan sistem pendukung, satelit dan jalur-jalur transmisi. Kedua, manajemen informasi; protokol untuk mengenali siapa yang berkomunikasi, informasi apa dan untuk siapa, prioritas apa yang harus diberikan untuk informasi itu, dan bagaimana informasi itu disebarkan dan ditafsirkan; (7) Respons terhadap yang selamat dan penanganannya. Pengkajiannya harus memperhatikan mekanisme penanganan sosial yang ada yang meniadakan perlunya bantuan dari luar. Yang selamat dari bencana mungkin memiliki kebutuhan baru dan khusus akan pelayanan-pelayanan sosial untuk membantu menyesuaikan diri dengan trauma dan gangguan yang disebabkan oleh bencana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan penelitian evaluatif, yaitu mengevaluasi pelaksanaan manajemen komunikasi bencana Merapi 2010. Dari hasil evaluasi akan dirumuskan beberapa masukan kebijakan untuk pengelolaan (manajemen) komunikasi bencana Merapi DIY, terutama saat tanggap darurat agar dapat mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi para korban. Data primer dikumpulkan dari hasil pengamatan, wawancara (dengan ketua Forum Penanggulangan Resiko Bencana disingkat PRB-DIY dan perwakilan LSM, pendonor, relawan, dan korban bencana) guna memperoleh informasi mengenai pengelolaan atau manajemen komunikasi bencana yang telah dilakukan. Selanjutnya dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang subjek penelitian sebagai berikut; (a) Ketua dan Anggota Forum Penanggulangan Resiko Bencana (PRB) di DIY; (b) Perwakilan LSM; (c) Perwakilan pendonor; (d) Perwakilan relawan; (e) Perwakilan korban bencana.

Data yang dikumpulkan melalui FGD meliputi antara lain; (a) Pengalaman yang pernah dilakukan oleh para peserta dalam mengikuti berbagai program pengelolaan bencana Merapi 2010; (b) Kendala-kendala yang dialami selama terlibat dalam pengelolaan bencana; (c) Tanggapan mengenai pengelolaan bencana Merapi 2010; (d) Masukan tentang manajemen komunikasi bencana di Merapi 2010.

Sementara itu data sekunder dihimpun dari beberapa sumber tertulis sebagai berikut; (a) Rencana Kontijensi Kabupaten Sleman; (b) Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Bencana Merapi di Sleman DIY; (c) Laporan kegiatan advokasi manajemen komunikasi Bencana dari LSM-LSM; (d) Laporan kegiatan advokasi manajemen komunikasi Bencana dari pendonor; (e) Hasil-hasil penelitian sebelumnya (tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal tentang tema terkait.

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif. Pertama-tama keseluruhan data disajikan dalam display data, kemudian direduksi mana yang relevan dan mana yang tidak, dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk kemudian dibuat kategorisasi. Tahap berikutnya adalah membuat interpretasi dan kesimpulan hasil penelitian mengenai manajemen komunikasi bencana Merapi 2010 dan kendala-kendala manajemen komunikasi bencana yang pernah dilakukan di DIY. Hasil pencapaiannya dirumuskan kebijakan berupa rekomendasi tentang manajemen komunikasi bencana di daerah bencana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

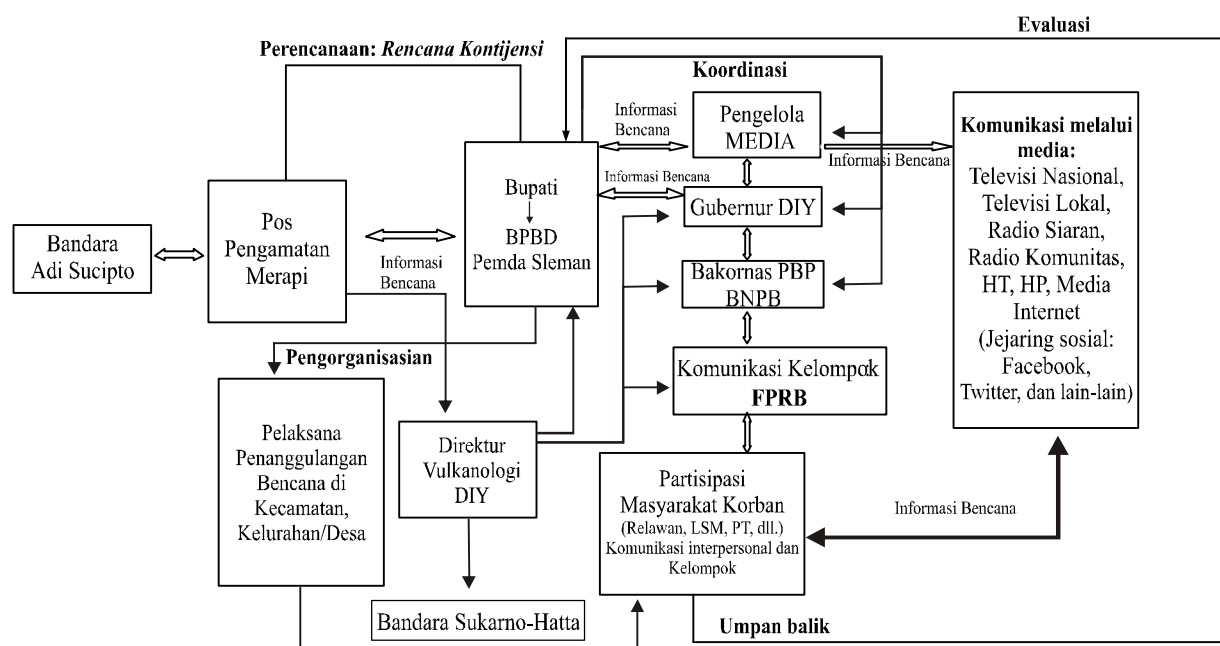
Berdasarkan hasil pengamatan pada tanggal 20 September 2010, status kegiatan Gunung Merapi ditingkatkan dari Normal menjadi Waspada, dan selanjutnya ditingkatkan kembali menjadi Siaga (Level III) pada 21 Oktober 2010. Sejak 25 Oktober 2010, pukul 06:00 WIB, status kegiatan Gunung Merapi dinaikkan dari "Siaga" (Level III) menjadi "Awat" (Level IV), dan pada 26 Oktober 2010 Gunung Merapi mengalami erupsi pertama, dan berlanjut dengan erupsi lanjutan hingga awal November 2010. Kejadian erupsi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban

jiwa dan harta, bencana yang selanjutnya ditetapkan sebagai kejadian bencana alam. Bencana ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bencana serupa dalam lima kejadian sebelumnya, yakni pada tahun 1994, 1997, 1998, 2001 dan 2006. Berdasarkan data BNPB pada tanggal 12 Desember 2010 (<http://bencana.bappenas.go.id/imdff/renaksi-merapi>, diakses 9 Mei 2012), bencana erupsi Gunung Merapi ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 277 orang meninggal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, telekomunikasi, listrik dan energi, serta air bersih. Di sektor permukiman, akibat erupsi Gunung Merapi telah mengubur sejumlah dusun di Provinsi DI Yogyakarta dan mengakibatkan ribuan rumah penduduk mengalami kerusakan. Tercatat 2.636 unit rumah rusak berat dan tidak layak huni, 156 rumah rusak sedang, dan 632 rumah rusak ringan, sehingga secara keseluruhan 3.424 rumah di wilayah Provinsi DI Yogyakarta yang mengalami kerusakan dampak erupsi Gunung Merapi. Gambar 3 memperjelas data tentang kerusakan dan kerugian akibat erupsi Merapi 2010.

Berbagai temuan dalam keadaan darurat bencana, secara umum adalah (Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwana X, 19 Juli 2012:2); (1) Situasi yang kacau, orang-orang dengan ke-

mampuan dan keahlian sendiri berusaha membantu para korban yang rentan. Para sukarelawan belum terorganisir, dengan inisiatif individu memainkan peran menangani situasi; (2) Munculnya desas-desus, pada kasus Merapi muncul desas-desus bahwa “Penguasa Merapi” akan memuntahkan letusan yang lebih dahsyat; (3) Rumah sakit kelebihan beban, yaitu banyaknya jumlah pasien yang meninggal maupun yang terluka melebihi kapasitas rumah sakit; (4) Sistem pemerintahan tidak berfungsi, terutama di pusat bencana, sebagian besar pejabat dan staf juga menjadi korban. Mereka ikut shock, sehingga ketika itu tidak tahu harus melakukan apa; (5) Tindakan pejabat pemerintahan dan penduduk lebih bersifat reaktif daripada antisipatif. Selain itu, ada janji-janji dari para pejabat atau pun individu untuk memberikan kenyamanan sementara kepada para korban, (6) Masalah ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah karena respons pemerintah kurang memuaskan; (7) Banyak juga kepentingan politik di daerah bencana, misalnya memberi sumbangan dengan memasang bendera atau umbul-umbul partai politik tertentu, memberi bantuan dengan harapan yang dibantu memilih calon legislatif tertentu, dan lain-lain.

Sebagai negara tropis yang rawan datangnya bencana, Indonesia mau tidak mau harus tetap waspada dalam melakukan penanganan bencana. Penanganan yang bersifat tanggap darurat menjadi



Gambar : 4. Model Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 saat Tanggap Darurat

prioritas utama untuk menekan jatuhnya korban jiwa. Untuk itu, kebutuhan informasi yang akurat, cepat, dan mudah dijangkau sangat diharapkan untuk membantu penanganan bencana secara menyeluruh. Hal ini terkait dengan manajemen komunikasi bencana, mulai dari perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan, serta evaluasi penanggulangan bencana, terutama saat tanggap darurat. Berikut temuan penelitian ditunjukkan dalam gambar 4.

Model manajemen komunikasi bencana di Kabupaten Sleman ditunjukkan dengan adanya aliran informasi dan komunikasi dari perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, dan evaluasi serta umpan balik. Kabupaten Sleman sudah memiliki perencanaan sektoral yang disusun dalam Rencana Kontijensi 2009 guna mengantisipasi apabila ada bencana Merapi. Ternyata perencanaan tersebut sangat membantu proses manajemen bencana ketika benar-benar terjadi bencana Merapi 2010 (Paripurno, FGD 26 Juli 2012). Berikut deskripsi tentang perencanaan sektoral di Kabupaten Sleman yang terdapat dalam dokumen Rencana Kontijensi 2009.

Perencanaan

Perencanaan manajemen bencana di Kabupaten Sleman dinamakan perencanaan sektoral yang ditujukan untuk mencapai penanganan bencana alam yang dapat melindungi segenap masyarakat. Perencanaan sektoral dilakukan sebagai fungsi manajemen penanganan bencana yang telah melakukan evaluasi terhadap tingkatan ancaman yang terjadi, prinsip evakuasi pengungsian untuk perlindungan masyarakat sementara, dan menata kembali kehidupan pasca bencana. Perencanaan sektoral terdiri atas; (1) Sektor manajemen dan koordinasi atau komunikasi; (2) Sektor kesehatan; (3) Sektor sarana prasarana, (4) Sektor logistik. Mengingat penelitian ini mengenai manajemen komunikasi bencana, penulis hanya mendeskripsikan Sektor Manajemen dan Koordinasi atau Komunikasi, yang meliputi; situasi, sasaran, dan kegiatan. Berikut penjelasan tentang setiap sektor berdasarkan Rencana Kontijensi Merapi 2009 (FGD, 2012); (a) Terkait dengan situasi, bencana erupsi Gunung Merapi (menurut perencanaan ini) membuat

keadaan dan situasi daerah tidak terkendali sehingga memerlukan penanganan bencana alam yang efisien dan terpadu. Dalam simulasi dampak diperkirakan terjadi gelombang pengungsian sebanyak 12660 orang yang terdiri atas 4144 kelompok rentan dan 8516 kelompok usia produktif. Beberapa mekanisme penanggulangan harus diperhitungkan, karena adanya sistem yang tidak berfungsi akibat bencana, oleh karena itu harus ada upaya untuk mengendalikan, mengatur dan mengkoordinasikan semua kegiatan penanggulangan bencana. Sektor manajemen selaku wadah koordinasi pelaksana penanggulangan bencana di Kabupaten dan sistem POSKO yang dilakukan dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan. Sektor manajemen dan koordinasi melakukan tindakan berdasarkan Prosedur Tetap Erupsi Gunung Merapi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sleman No.83/kep.KDH/A/2006 tentang Mekanisme Penanganan Bencana Gunung Merapi.

(b) Adapun sasaran yang dilakukan adalah; (1) mengadakan koordinasi dengan seluruh instansi terkait, terkendalinya penanganan bencana, terkendalinya pelaksanaan evakuasi mandiri secara efektif dan efisien sehingga dicapai; (a) Terselamatkannya dan terevakuasinya korban bencana sejumlah 12660 orang; (b) Terevakuasinya serta teridentifikasinya korban yang meninggal dunia; (c) Terkoordinasikannya kegiatan pencarian dan penyelamatan korban yang hilang; (2) Terkendalinya sistem keamanan lingkungan kawasan rawan bencana; (3) Terkendalinya logistik pengungsi; (4) Terkendalinya upaya penanganan kesehatan pengungsi; (5) Terkoordinasinya upaya penanggulangan bencana dan bantuan yang mengalir; (6) Terdatanya kerugian dan korban akibat bencana.

(c) Kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat dilihat pada tabel 1;

Koordinasi

Hasil FGD juga mengemukakan berbagai langkah koordinasi dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk melakukan koordinasi dalam manajemen komunikasi bencana Merapi 2010, antara lain; (1) BNPB berkantor di DI Yogyakarta, guna mempermudah koordinasi

Tabel 1. Kegiatan yang Direncanakan apabila ada Bencana Merapi di Kabupaten Sleman

NO	KEGIATAN	PELAKU	WAKTU
1	Mendirikan Posko	DINAS P3BA	Setelah adanya tanda-tanda bencana
2	Aktivasi manajemen dan koordinasi	DINAS P3BA, TNI, POLRI, POL PP, Kesehatan, Telematika, Kimpraswil, Nakersos	Jika terjadi tanda-tanda bencana
3	Mengoordinasikan kegiatan sektoral	DINAS P3BA, TNI, POLRI, POL PP, Kesehatan, Telematika, Kimpraswil, Nakersos	Setiap hari
4	Membuat laporan	DINAS P3BA, TNI, POLRI, POL PP, Kesehatan, Telematika, Kimpraswil, Nakersos	Setiap hari
5	Memberikan arah pelaksanaan	BUPATI, SEKDA, ASISTEN, DINAS P3BA, TNI, POLRI, POL PP, Kesehatan, Telematika, Kimpraswil Nakersos	Setiap hari
6	Menerima dan menyampaikan	DINAS P3BA, TNI, POLRI, POL PP, Kesehatan, Telematika, Kimpraswil, Nakersos	Setiap saat

(Sumber: Paripurno, FGD 26 Juli 2012, Rencana Kontijensi Kabupaten Sleman tahun 2009).

antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten); (2) Membentuk Posko Utama di Pakem sebagai fungsi manajemen dan koordinasi penanganan bencana; (3) Memenuhi pelayanan logistik dengan mendirikan posko-posko, tenda pengungsian dilengkapi dapur umum dengan tetap memperhatikan kelompok rentan; (4) Memenuhi pelayanan kesehatan dengan menyelenggarakan posko kesehatan di setiap barak pengungsian dan balai kesehatan lain; (5) Memenuhi pelayanan sarana-prasarana kehidupan (transport, tempat tinggal sementara, sanitasi) di barak atau tenda pengungsian (MCK, air bersih), dengan tetap memperhatikan kelompok rentan; (6) Mengidentifikasi jenis-jenis bantuan, menghimpun bantuan serta mendistribuíkannya; (7) Memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang membutuhkan; (8) Memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai kebajikan dalam penanganan bencana; (9) Evakuasi korban, meninggal dunia dan yang masih hidup melalui relawan, tim SAR, LSM, dan lain-lain; (10) Penanganan Pengungsi (tenda, logistik, sarana dan prasarana lainnya), lembaga terkait; (11) Mengidentifikasi negara-negara yang memungkinkan

memberikan bantuan secara sukarela; (12) Menyebarkan informasi tentang bencana yang terjadi melalui, media cetak, elektronik dan telematika.

Pelaksanaan

Pada saat tanggap darurat, manajemen komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi dari pemantau gunung Merapi (Pemda Sleman DIY), melakukan koordinasi antara pemda Provinsi dan pemerintah pusat, akhirnya disepakati BNPB melakukan koordinasi di Yogyakarta, karena status bencana Merapi tidak distatuskan sebagai bencana nasional (FGD, 26 Juli 2012).

Selain kepada pemerintah, informasi mengenai bencana Merapi juga langsung disebarluaskan melalui berbagai media massa seperti radio, televisi lokal dan nasional, komunikasi personal, kelompok, dengan menggunakan HT, HP, radio komunitas, serta media internet yang lebih cepat menyebar ke seluruh warga masyarakat. Dalam pelaksanaan ini guna mengatasi tanggap darurat, semua elemen penyiaran langsung bertindak sesuai amanat PP nomor 50 tahun 2005, bahwa se-

mua lembaga peniaran harus segera memberi informasi kepada masyarakat terkait bencana alam yang terjadi. Sumber dari BMKG menjadi sumber resmi pemerintah di samping sumber-sumber dari Pemda DIY.

Pada pelaksanaan ini peneliti memperoleh banyak data dari Rizki (2011) yang mengungkapkan tentang kemampuan media dalam pengelolaan komunikasi bencana Merapi 2010. Dalam pelaksanaan pengelolaan bencana selalu ada pro dan kontra. Hal ini justru menambah ruwet proses penanganan bencana jika tidak diselesaikan secara bijak. Hal ini dapat ditemukandalam hal evakuasi korban bencana, distribusi bantuan dan logistik secara merata, serta kesigapan pemerintah dalam menentukan prediksi pascabencana. Pemerintah kurang cepat dalam memberi dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk evakuasi korban. Sebagai contoh, untuk melakukan evakuasi korban dan melaporkan situasi terakhir medan bencana, diperlukan alat komunikasi yang handal sebagai media koordinasi, seperti penggunaan *handy talkie* (HT) sangat membantu komunikasi dan usaha pemantauan.

Lebih lanjut Rizki mengatakan bahwa peran media semakin tangguh dalam penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jika dahulu media hanya sebatas radio, televisi, dan media cetak yang masih terkesan searah, maka sekarang komunikasi dapat dilakukan dua arah. Hal ini membuat masyarakat lebih sigap dalam melakukan umpan balik ke penyedia informasi. Dampaknya kepedulian masyarakat dalam masalah penanganan bencana, terutama dalam hal distribusi bantuan semakin cepat. Kecanggihan media telekomunikasi dan informasi telah mampu digabungkan menjadi satu kemasan, yaitu jejaring informasi dan sosial yang mudah diakses melalui berbagai perangkat telekomunikasi portabel. SMS, telepon seluler, dan internet saling digabungkan untuk membantu pengelolaan distribusi bantuan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Dengan pemanfaatan media tersebut, persoalan-persoalan pada saat tanggap darurat mudah diatasi. Para relawan tidak perlu terlalu lama menunggu instruksi dan bantuan dari pemerintah. Banyak masyarakat independen yang tergerak untuk bahu-membahu kepada saudaranya

yang sedang tertimpa musibah secara sukarela. Pada fase tanggap darurat, para korban dan pengungsi lebih membutuhkan bantuan secepat mungkin tanpa mewajibkan syarat yang berbelit-belit.

Twitter, Facebook, dan Portal Jalin Merapi sebagai Media Komunikasi Bencana Interaktif

Pada saat tanggap darurat erupsi Merapi 2010, banyak ahli meramalkan bahwa efek erupsi akan berlangsung selama beberapa minggu, sehingga diinstruksikan agar warga harus bertahan di dalam pengungsian hingga keadaan benar-benar aman. Kebutuhan informasi tentang bantuan dan pendataan pengungsi semakin penting seiring dengan semakin luasnya jangkauan pengungsi di daerah sekitar lingkaran Merapi. Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dengan generasi digitalnya, mulai memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyediakan penyaluran informasi, bantuan, dan tenaga secara virtual, baru kemudian disampaikan ke pihak yang membutuhkan secara nyata. Banyak kelompok yang turut berpartisipasi dalam penggalangan dan penyaluran dana melalui facebook, twitter, dan media sosial lainnya.

Melalui sistem penggalangan bantuan dan penyediaan informasi yang terorganisir, pengelolaan penanganan bencana terutama pada saat tanggap darurat menjadi lebih efektif walaupun pemerintah belum banyak bertindak. Buktinya, beberapa hari setelah gencar tanggap bencana erupsi diberitakan, dengan berbagai inisiatif, warga mulai menggalang kepedulian melalui media jejaring sosial. Sebagai contoh Posko Jalin Merapi (Jaringan Informasi Lingkaran Merapi), yang pada awalnya hanya membuat web yang berisi foto terkini keadaan Merapi dan radio *streaming* yang terhubung dengan relawan pemantau melalui HT, pada akhirnya disempurnakan dengan membuat akun Twitter @jalinmerapi, akun grup Facebook Jalin Merapi, serta portal khusus Jalin Merapi yang beralamat di www.merapi.combine.or.id.

Salah satu pengelola akun twitter @jalinmerapi adalah Sukiman Mochtar Pratomo, warga Desa Deles, Kecamatan Sidorejo, Klaten, yang berjarak hanya empat kilometer dari puncak

Gunung Merapi dan satu kilometer dari Sungai Woro yang telah dibanjiri lahar dingin. Pengamatan visual dari jarak dekat memang beresiko tinggi, namun Sukiman dan relawan lain telah empat tahun melatih diri dengan standar *Search and Rescue* (SAR). Dalam waktu cepat, akun ini telah diikuti lebih dari 30 ribu *followers*. Mereka mengelola komunikasi dua arah dan membagi informasi krusial seputar Gunung Merapi (Rizki, 2011).

Pemanfaatan jejaring social facebook dan twitter juga dilakukan oleh Saptuari Sugiharto, seorang pengusaha muda sukses yang bergerak di percetakan digital. Jejaring sosial Facebook dan Twitter dimanfaatkan sebagai wadah bersosialisasi dan menggalang dana bencana Merapi sehari setelah Merapi meletus tanggal 26 Oktober 2010. Ia mengajak teman-temannya untuk ikut berbagi. Pada awalnya ia hanya berharap memperoleh uang satu hingga dua juta saja beserta sejumlah barang. Setelah dua minggu kemudian, hasilnya cukup mencengangkan, halaman Facebook dan Twitter-nya mampu meraup bantuan lebih dari 170 juta rupiah (Sucahyo, 2010). Saptuari berusaha memindai seluruh kuitansi belanja dan memotret proses penyerahan barang bantuan kepada korban. Seluruh teman Facebook atau *follower* di Twitter-nya diberi kesempatan untuk dapat mengakses halaman yang dibuat secara khusus untuk transparansi bantuan tersebut.

Keterbukaan inilah yang membuat donatur percaya dengan usaha Saptuari, selain akuntabilitas dirinya sebagai seorang pengusaha muda ternama. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan jejaring informasi Twitter dipermudah dengan euforia kemunculan perangkat telekomunikasi yang mulai merakyat. Di dalamnya dimanjakan dengan fitur-fitur khusus yang mengarah ke penggunaan jejaring informasi dan sosial, sehingga pemakainya dapat melakukan *update* informasi secara *real time*. Sebut saja *gadget-gadget* portabel seperti Blackberry dan *smartphone* lain sudah banyak mendukung aplikasi seperti Twitter dan Facebook. Facebook dikenal sebagai jejaring sosial yang dapat melakukan berbagai macam interaksi. Tidak hanya melakukan *update* informasi, tetapi juga mampu membentuk sebuah forum diskusi yang sederhana. Peran Facebook lebih banyak berisi tentang penggalangan bantuan dan *share* informasi seputar

berita terkini antar sesama anggota grup. Anggotanya saling menanggapi dalam bentuk komentar maupun pemberian reputasi atau rating *like*.

Penggunaan facebook untuk pengumpulan dana bantuan, dilakukan oleh Alfia Innayati bersama kawan-kawannya. Mereka membuat grup di Facebook dengan nama Komisi Pemuda Keparakan Peduli Merapi. Mereka menyebarkan keberadaan grup tersebut untuk menggalang dana dan bantuan logistik dari kawan sekolah dan rekan kerja yang terhubung mudah melalui jaringan sosial Facebook. Bahkan, bantuan hingga didapat dari seorang warga Belanda yang mengirimkan uang senilai 150 Euro untuk dua bayi kembar yang turut menjadi korban bencana Merapi (Sucahyo, 2010).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, revolusi penggunaan jejaring informasi dan sosial menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menyikapi bencana. Facebook dan Twitter telah merubah cara manusia untuk saling berhubungan dan memanfaatkannya untuk saling berbagi. Media tersebut telah mampu membuktikan diri menjadi arena berbagi informasi yang tidak bisa dianggap remeh, bahkan media tersebut sangat bermanfaat untuk memfasilitasi pemecahan masalah komunikasi bencana terutama pada saat tanggap darurat.

Di samping facebook dan twitter, pemanfaatan portal bencana dalam peristiwa erupsi Merapi yang dimulai sekitar bulan Oktober 2010 merupakan inisiatif berharga yang patut diacungi jempol. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Posko Jalin Merapi melalui portalnya. Pada kenyataannya, portal tersebut mampu menjadi pintu gerbang komunikasi antara pencari informasi dengan keadaan bencana yang sedang terjadi. Jalin Merapi mengembangkan konvergensi media dengan *streaming* radio komunikasi RIGG, radio komunitas, dan layanan pesan pendek (SMS) untuk melayani publik yang ingin mengetahui kondisi dan situasi Gunung Merapi terkini, terutama penanganan para pengungsi dan korban Merapi. Tujuan awal pembuatan Portal Jalin Merapi yaitu untuk membantu para sukarelawan di Posko Jalin Merapi yang mengerjakan pendataan korban, penyebarluasan logistik, obat-obatan, dan pengelolaan informasi lapangan. Kerja-kerja pendataan dinilai berjalan lancar dan mudah berkat



Gambar 3. Patok evakuasi sebagai wadah komunikasi kelompok (Purnomo, 2011).

bantuan portal tersebut, meskipun para sukarelawan yang terlibat masih awam menggunakan piranti lunak yang dimaksud (Suparyo, 2010).

Portal Jalin Merapi sendiri dibuat dengan menggunakan perangkat lunak sumber terbuka (*open source*). Portal semacam ini sebenarnya tidak perlu membutuhkan banyak biaya namun dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Banyak cara yang dapat dituju untuk mencapai sebuah tujuan mulia, yaitu menyampaikan informasi secara terbuka dengan segala keterbatasan yang ada. Informasi yang ada pada portal tersebut disampaikan secara dinamis, mulai berita seputar kondisi daerah sekitar Merapi, radio *live streaming* pemantau, daftar kebutuhan pengungsi, informasi persebaran pengungsi, pencarian korban hilang dan meninggal, serta berbagai tanggapan dan komentar yang muncul dari berbagai jejaring informasi. Semuanya saling terhubung dan terkemas secara rapi dalam satu wadah, yaitu berupa portal bencana Jalin Merapi.

Contoh pemanfaatan Jalin Merapi yaitu ketika pernah suatu saat distribusi bantuan menumpuk di posko pengungsian terbesar di wilayah Sleman, yaitu Stadion Maguwoharjo. Dengan menghimpun data yang ada, kelebihan pasokan bantuan tersebut segera dimasukkan ke dalam daftar informasi logistik. Sedangkan kekurangan bantuan di posko lain dapat diatasi dengan melakukan *request* terlebih dahulu ke portal tersebut dengan mengisi daftar data dan kebutuhan pengungsi. Selanjutnya, melalui prosedur yang ada, pengirim dan penerima bantuan melakukan konfirmasi melalui *contact person* yang disertakan. Bantuan pun dapat segera dikirimkan dan informasi dapat di-*update* kembali dengan

cepat, tanpa harus banyak melakukan birokrasi yang lama dan berlebihan.

Contoh lain proses evakuasi, baik yang berhubungan dengan pendataan korban meninggal, orang hilang, sampai penempatan pengungsi, semuanya lebih aktual ketika dihimpun dan disampaikan secara langsung melalui portal tersebut. Tidak jarang berbagai media arus utama seperti radio, televisi, dan surat kabar banyak mengambil data dari media informasi *online*, tentu melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya.

Berbagai kemudahan akses informasi mengenai pengelolaan bencana Merapi, terutama pada saat tanggap darurat, harus diimbangi dengan pengelolaan dan transparansi informasi yang baik supaya hasilnya optimal. Sebagai contoh, untuk melakukan penyaluran bantuan yang merata, suatu barak atau penampungan pengungsi harus terlebih dahulu melakukan pendataan jumlah pengungsi beserta kebutuhannya. Untuk itu, sangat diperlukan tenaga ahli yang dapat mengelola informasi tersebut dengan tepat.

Berkaitan dengan keunggulan media informasi digital dewasa ini, pemerintah harus memikirkan lagi strategi terbaik untuk menanggapi bencana yang datang secara tiba-tiba, terutama yang berhubungan dengan penggalangan dan distribusi bantuan. Langkah-langkah yang dilakukan harus lebih taktis, sehingga diperoleh hasil yang cepat dan maksimal. Dibutuhkan sinergi komunikasi antara komunikasi interpersonal, kelompok, dan melalui media massa serta media baru dalam pengelolaan bencana, sehingga hasilnya pengurangan resiko bencana bisa dicapai terutama pada saat tanggap darurat. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan antara pemerintah dan korban, relawan dan korban, pemerintah dan relawan, serta antarkorban dengan menggunakan prinsip-prinsip: keterbukaan, kejujuran, saling merespon secara positif, simpati dan empati. Komunikasi kelompok dapat dilakukan antar-kelompok masyarakat dengan kelompok relawan, kelompok LSM, kelompok pemerintah dan komunitas-komunitas lainnya. Dalam komunikasi kelompok diperlukan wadah atau tempat untuk berkumpul dalam mengatasi bencana, seperti patok evakuasi pada komunitas Pasak Merapi (gambar 3).

Salah satu komunitas yang aktif di Merapi adalah Pasak Merapi. Koordinator Pasak Merapi (Sukiman), mengatakan komunitas ini memberikan pelatihan bagi warga Merapi untuk memahami tanda-tanda erupsi dan upaya yang harus dilakukan jika Gunung Merapi meletus atau menghadapi ancaman lahar dingin. Pasak Merapi membentuk Tim Siaga Desa yang dikoordinir oleh Kepala Desa setempat. Mereka telah membuat prosedur tetap untuk penanganan bencana di masing-masing dusun, di antaranya mengenai proses evakuasi warga jika sewaktu-waktu Merapi meletus (Purnomo, 2011). Mereka menentukan tempat berkumpul warga apabila Merapi mengeluarkan abu vulkanik, berupa Patok Evakuasi. Patok-patok evakuasi juga dipasang di sejumlah tempat untuk memudahkan warga jika mereka harus mengungsi, sehingga masyarakat tinggal mengikuti patok itu saja untuk melalui jalur yang aman dan bertemu di titik kumpul sebelum dibawa ke tempat pengungsian. Komunitas-komunitas Merapi juga sering melakukan pertemuan bulanan yang bukan hanya terkait dengan pembahasan waspada bencana tetapi juga untuk penghijauan Merapi (mitigasi bencana Merapi).

Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) DIY, FGD 26 JULI 2012

Bencana meletusnya Gunung Merapi Di Wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, cukup mengagetkan masyarakat dan Pemerintah Daerah yang terdampak oleh letusan. Letusan yang terjadi pada tahun 2010 dianggap berbeda dengan tipe letusan Merapi sebelumnya. Letusan Merapi pada tahun 2010 mengarah ke Selatan dan Barat yang Selama ini dianggap tidak pernah terlewati awan panas letusan. Perbedaan lainnya, Jangkauan letusan yang sebelumnya diperkirakan hanya sejauh delapan kilo meter ternyata sampai pada radius dua puluh kilo meter.

Perbedaan antara perkiraan tipe letusan dengan kenyataan yang terjadi menyebabkan penanganan kondisi tanggap darurat agak kedodoran. Korban letusan yang sebelumnya diperkirakan sangat minimal ternyata membengkak menjadi dua ratus orang lebih meninggal. Jumlah pengungsi yang sebelumnya diperkirakan tidak terlalu banyak membengkak menjadi dua ratus ribu

orang. Luasnya wilayah terdampak ini tentunya membawa implikasi yang sangat luas.

Implikasi penanggulangan tanggap darurat menjadi sangat luas meliputi Logistik, tempat pengungsian, masalah kesehatan, penanggulangan korban baik jiwa maupun harta benda, koordinasi antar sektor. Berbagai hal tersebut membutuhkan penanganan yang segera dan komprehensif untuk menghindari kesimpangsiuran dan ketidaksesuaian penanganan yang bisa brujung pada membengkaknya jumlah korban.

Bencana meletusnya gunung Merapi terjadi setelah bencana besar yang lain yang terjadi di daerah Bantul dan Yogyakarta yaitu gempa bumi dahsyat di tahun 2006. Pengalaman menghadapi gempa di Bantul dan Yogyakarta pada tahun 2006 sedikit banyak telah membantu penanganan gempa Merapi. Berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki oleh para sukarelawan, lembaga-lembaga donor baik lokal maupun internasional, LSM dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dalam menangani gempa Bantul, maka untuk penanganan tanggap darurat letusan Merapi dibentuklah Forum Pengurangan Resiko Bencana. Forum ini adalah wujud dari amanat dalam UU RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa dalam pelaksanaan penanggulangan bencana harus melibatkan para pihak dalam satu wadah koordinasi, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Forum ini merupakan lembaga non formal yang dijadikan wadah dari berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah serta sukarelawan yang akan melakukan penanganan bencana. Anggota forum terdiri dari semua jajaran SKPD, BPBD, LSM, Lembaga-lembaga donor baik dalam maupun luar negeri, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Struktur forum terdiri dari Dewan Kehormatan yaitu Sri Sultah HB X, dan Eko Teguh Paripurno serta dibentuk Koordinator Gugus Tugas atau Inter-Klaster (Juli E Nugroho) yang membawahi sembilan kluster. Adapun kluster tersebut adalah; (1) Kesehatan; (2) *Water Sanitation* dan *Hygiene*; (3) Media, Komunikasi, dan Manajemen Informasi; (4) Pendidikan; (5) Gender, Anak, dan Disabilitas; (6) Hunian dan Infrastruktur; (7) Penghidupan dan Ketahanan Pangan; (8) Logistik dan Transportasi; (9) Lingkungan Hidup. Masing-masing kluster memba-

wahi lembaga-lembaga dan sukarelawan yang ingin membantu pada *cluster-cluster* tertentu, berjumlah puluhan dalam satu kluster.

Forum PRB melakukan koordinasi dan komunikasi melalui koordinator antar kluster yang dilakukan dua hari sekali (saat bencana) dan *update* data dilakukan secara terus-menerus melalui media *on line*. Forum PRB inilah yang juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah terdampak seperti Pemda Kabupaten Sleman, Pemda Provinsi DIY sampai Pemda-Pemda di Provinsi Jawa Tengah. Bahkan forum ini juga menjalin koordinasi dan komunikasi dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) di tingkat Pusat, meskipun bencana Merapi 2010 tidak dinyatakan sebagai bencana nasional.

Kebutuhan logistik, penyelamatan korban, penyelamatan asset warga sampai informasi mengenai pengungsian dilakukan secara berjenjang dari lapangan mengalir sampai ke koordinator kluster sampai lembaga-lembaga donor dan kemudian kembali lagi sampai ke korban. Koordinasi dan komunikasi penanggulangan bencana melalui model forum dan kluster semacam ini sangat membantu penanganan korban karena bisa lebih cepat dan efektif ketimbang menunggu apa yang dilakukan oleh birokrasi. Birokrasi dalam penanganan tanggap darurat dinilai sangat lambat karena harus mempertimbangkan hambatan-hambatan birokrasi yang ada seperti koordinasi antar dinas, pelaporan keuangan, perintah atasan, dan lain-lain.

Berikut pemaparan dari koordinator antarkluster atau Gugus tugas mengenai tanggap darurat bencana Merapi 2010 (Y1, FGD 26 Juli 2012);

Forum PRB DIY dan Jawa Tengah didirikan pada usaha-usaha pengurangan resiko bencana pada tahun 2009-2010, bergerak pada sebelum bencana 2007 dan setelah bencana gempa DIY 2006. Pada waktu status merapi naik, sementara kesiapan dari berbagai aktor yang terlibat perlu dicek sudah mempersiapkan diri atau belum, supaya komunikasi dan informasi penting dapat dilakukan. Pada tanggal 22 November 2010 tentang kondisi merapi terdapat beberapa gambaran yaitu; (1) Potensi ancaman yang terjadi lebih

besar dari kejadian sebelumnya; (2) Potensi pemukiman yang terkena bencana; (3) Mengecek kesiapan pemerintah Sleman dalam mengatasi potensi ancaman yang telah terdata atau tercatat; (4) Pada tanggal 26 November 2010 apakah respon sebanding dengan potensi ancaman bencana, untuk itu Forum PRB dan anggota perlu mengecek masalah itu.

Kegiatan yang dilakukan oleh Forum PRB di antaranya; (a) Perencanaan secara cepat; (b) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah; (c) Mewadahi anggota forum yang sesuai kebutuhan, memfasilitasi, koordinasi yang mendorong mengatasi bencana Merapi; (d) Dibuat sistem komunikasi dan lembaga-lembaga yang terkait; (e) Rapat koordinasi Forum PRB diadakan dua hari sekali; (f) Mengkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, lembaga LSM dan media massa.

Agenda prioritas kegiatan yang dilakukan oleh Forum PRB antara lain; (a) Perencanaan Komunikasi; (b) Perencanaan Koordinasi kapasitas berupa Matrik lima W; (c) Mengurangi terjadinya distorsi barang-barang; (d) Dukungan Transportasi; (e) Kegiatan Evaluasi dilakukan dua hari sekali.

Kegiatan bantuan dapat disesuaikan dengan UN OCHA, UNICEF dan lain-lain. Anggota Forum PRB berasal dari berbagai bidang masing-masing yang berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki.

Dalam FGD di FPRB 26 Juni 2012, Yds (Pembantu Umum dan Kesekretariatan) mengungkapkan bahwa manajemen komunikasi bencana dibutuhkan untuk dapat membantu pelaksanaan penanggulangan bencana dengan baik. Pelaksanaan yang dilakukan oleh bidang kesekretariatan di antaranya; (1) Memberikan informasi alternatif yang tidak terekam dengan baik; (2) Manajemen komunikasi sudah cukup membantu dan berjalan dengan lancar; (3) Kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan informasi dari masyarakat dengan meredam terjadinya gejolak masyarakat.

Gagasan timbulnya website FPRB, dikarenakan adanya banyak pertanyaan-pertanyaan dari lembaga-lembaga dan masyarakat. Fungsi

web ini ialah; (1) Untuk memudahkan teman-teman dan anggota dalam mendapatkan informasi; (2) Setiap gugus tugas dan tupoksi memiliki jadwal yang telah ditentukan; (3) Adanya proses saling menguatkan dalam *cluster-cluster* yang ada.

Agenda kegiatan yang telah dilakukan ke-sekretariat sebagai berikut; (a) Mengadakan jumpa pers dan merilis informasi; (b) Komunikasi dengan teman media terkait kesalahan data tentang pengungsi; (c) Kerjasama yang paling aktif media Radio, Koran KR, TV One dan lain sebagainya; (d) Pengadaan layar PRB, Website.

Beberapa *Cluster* yang terbentuk melakukan aktivitas dengan membagi waktu antar FPRB dengan pekerjaan di lembaga-lembaga yang terkait. Berikut paparan peserta FGD (Ign K) *cluster* Pendidikan;

Kegiatan yang dilakukan di *cluster* pendidikan pada waktu penanggulangan bencana melibatkan 36 lembaga Nasional, Pemerintah Daerah (Lokal), serta Lembaga Internasional. Lembaga Internasional diantaranya *Plan Intertional, Safe Children, Unicef* dimana lembaga internasional hanya melihat kondisi situasi yang terjadi.

Agenda kegiatan *Cluster* pendidikan sebagai berikut; (1) Melakukan respon terutama pada anak-anak dari usia kecil sampai sekolah SMU; (2) Koordinasi dilakukan setiap malam dua hari sekali untuk mengupdate hasil dilapangan; (3) Hasil yang diperoleh dimasukkan kedalam informasi *cluster* pendidikan dan tiap-tiap anggota *cluster*.

Dalam mengatasi kejadian di pengungsian terutama pendidikan, masih adanya gap (masalah) dari pemerintah ketika kebutuhan dari lokal untuk menyuplai pelayanan pendidikan bagi anak-anak sekolah, seperti di posko acuh dengan dinas Provinsi dalam hal pendidikan masih kurang tertangani dengan baik. *Cluster* pendidikan membuat solusi dengan bekerja sama dengan media dengan melibatkan anak-anak dalam belajar dan menulis tanpa beralas meja dengan mengambil panorama Gunung Merapi sebagai *background*. Setelah dipublikasikan baru dating sumbangan yang diharapkan.

Sarana pendukung pelayanan seperti tenda untuk pendidikan. Kendalanya, masyarakat

masih kurang tahu bagaimana cara membangun tenda. Di daerah D.I. Yogyakarta terutama di Kabupaten Sleman sudah mempunyai sub atau bagian mengatasi bencana merapi, tetapi rencana itu tidak dapat terelakkan dengan kondisi evakuasi yang harus dilaksanakan secara besar-besaran. Support pemandu pelayanan pendidikan sektor yang ada masih kekurangan tenaga, maka dibutuhkan kerjasama dengan pihak PGRI dan LSM Pendidikan serta menjaring dari berbagai Universitas sebagai sarana layanan pendidikan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan di pertemuan antar dan *intercluster* sesuai dengan kebutuhan *cluster*. Di akhir tanggap darurat dibuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

Menurut peserta FGD (Ttg) dari BPBD DIY bahwa ;

Koordinasi dilakukan pada setiap saat antar anggota *cluster*. Forum PRB koordinasi dari waktu siaga menuju waspada, dengan anggota BPPTK untuk mengklarifikasi tentang penyampaian informasi. Di mana kondisi waspada untuk menyampaikan kesiapsiagaan dan perencanaan penanggulangan bencana Gunung Merapi yang lebih besar. Media pada waktu itu langsung meliput kejadian tersebut ke lapangan sehingga masyarakat bingung dan takut. Informasi dari mana harus diterima atau harus dapat diikuti. Komunikasi Forum PRB dimanfaatkan untuk membantu sistem teman-teman yang ada di lapangan yang kurang terorganisasi.

Pembentukan Forum PRB digunakan untuk; (1) Membantu komunikasi dan informasi di posko Utama di Pakem. Dengan adanya perubahan pola bencana, maka pada posko Utama mengalami perpindahan lokasi ke posko yang lain; (2) Pusat pengendalian dan pengkoordinasian; (3) Pembentukan gugus tugas *cluster* dibentuk sembilan *cluster* berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anggota Forum PRB; (4) Untuk menutupi GAP, sistem komunikasi ke wilayah kerja berdasarkan peta, menjadi dasar rapat; (5) Tujuan *cluster* agar ada integrasi, yang dapat membentuk Forum PRB.

Berikut pemaparan ET dari Pusat Studi Bencana UPNVY (FGD, 26 Juli 2012) terkait manajemen komunikasi bencana Merapi 2010;

Koordinasi sudah cukup baik, dimana Kabupaten Sleman sudah memiliki rencana kontijensi atas refleksi tahun 2007-2009. Jarak yang harus aman dari bencana yaitu berjarak 16 Km. Koordinasi sudah cukup baik ada kesadaran dari semua pihak dari kesepakatan yang telah dibuat. Organisasi masyarakat menyiapkan komunikasi dan transportasi. Masalah muncul ketika pemerintah Kabupaten Sleman dan pemerintah Provinsi belum sepakat mengenai masalah dana yang tidak sesuai rencana kontijensi akibat letusan yang di luar dugaan dengan jumlah pengungsi yang lebih besar. Dalam manajemen bencana Merapi 2010 terdapat kepentingan politik yang sulit terelakkan.

Pengalaman (Gg) dari IOM, *cluster* Logistik dan Transportasi bahwa;

Media yang digunakan oleh *cluster* logistik dan transportasi untuk *update* ke *cluster* bidang lainnya melalui Web Forum PRB. Apakah ada penumpukan barang atau tidak. Bagaimana pendistribusian ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Adanya wadah koordinasi yang baik dalam mengatasi pendistribusian, BNPB diminta memberikan reaksi cepat mengenai kapasitas, pengelolaan, pendataan logistik, ada perubahan data apa tidak dan pada saat *assessment*. Pengelolaan dan diseminasi logistik yang berasal dari logistik LSM dan swasta masih diperhitungkan proses pendistribusiannya. Penunjukan pihak-pihak tertentu diperlukan dalam proses pendistribusian logistik. Adanya dokumentasi pada setiap pos-pos yang telah terdata menjadi urgen. Sudah adanya SOP memudahkan cara kerja pendistribusian bantuan.

Berikut pemaparan *Cluster* Mata Pencaharian Kehidupan Masyarakat;

Pada kondisi tanggap darurat di masyarakat ada harta benda yang harus mereka selamatkan dan mereka pikirkan salah satunya binatang ternak. Kondisi darurat bagaimanakah kondisi lahan, pertanian dan perkebunan. Pergantian dari pemerintah daerah terkendala pada masyarakat. Terdapat desain setelah bencana dimana terdapat persamaan persepsi di semua masyarakat. Adanya perbedaan kapasitas di

pendidikan masyarakat, di mana hanya mindset membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang terkena musibah bencana merapi.

Semua bisa memberikan ke komunitas agar masyarakat mengetahui informasi pergantian sapi pada masyarakat, menimbulkan masalah psikologi sosial tentang masyarakat yang mengenai masalah ternak. Perlu adanya pengelolaan informasi masyarakat yang diaktifkan.

Bagaimana masyarakat dalam mengatasi penanggulangan bencana telah terbentuk dimana saling keterkaitan dan komunikasi antar kepala desa untuk saling menciptakan kegotongroyongan. *Cluster* ini juga mengadakan training disaster erupsi merapi. Kita harus waspada kepada media yang meliput tentang evakuasi secara besar-besaran membuat masyarakat bingung dan kaget serta takut karena media mencari sensasi berita agar menarik.

Hasil-hasil koordinasi tersampaikan kepada masyarakat. Kendala yang muncul adalah adanya jarak antara pemerintah pusat dan daerah, membuat penanganan korban ternak dan harta benda kurang berjalan dengan baik. Kendala komunikasi dapat dirumuskan menjadi tiga kendala yaitu; (1) Masih adanya gap informasi; (2) Belum melibatkan media massa di *cluster-cluster*; (3) Jenis komunikasi yang menjadi kebijakan pemerintah dan komunitas perlu ditegaskan.

Komitmen contingency (perencanaan) menjadi menarik dari hulu sampai hilir. Kepastian informasi dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas. Komunikasi jaringan guru yang ada dalam mencari tempat-tempat pengungsi masyarakat yang terpencar ada yang menggunakan rumah penduduk dan sekolahan-sekolahan. Dalam permasalahan pendidikan anak-anak yang pada waktu itu menghadapi ujian Nasional dibutuhkan cara untuk melengkapi dan menyiapkan anak-anak dalam sarana yang sudah dibagi dimana pada waktu itu ujian nasional di Maguwoharjo sarana belum ada untuk ujian dan guru-guru pengawas belum terbentuk. Pola migrasi yang berlangsung secara cepat media membutuhkan menu untuk menyiarkannya. Forum PRB menyiapkan menu informasi untuk media massa. Menurut evaluasi di *cluster*, ada arus informasi yang tidak menyadarkan Dekominfo (Departemen

man Komunikasi dan Informasi). Seharusnya Kominfo mengambil peran manajemen komunikasi bencana secara aktif.

Menurut pemaparan *Cluster Gender*; Masalah gender biasanya terjadi pada anak-anak dan ibu-ibu, dimana *cluster* gender harus menchecklist data yang dibutuhkan. Terdapat posko mandiri dan posko pemerintah. Data yang telah terkumpul dalam checklist dijadikan masukan dalam *cluster* gender seperti: kamar mandi yang kurang memadai bagi pengungsi dan kondisi stadion Maguwoharjo yang tidak layak. Ada permasalahan yang unik yang terjadi di Sleman, di mana warga yang merupakan pemilik wisata kuliner berharap menerima pengungsi di sana, dilarang oleh pihak pengelola yang mana dari pemerintah tidak memberikan ijin di daerah wisata kuliner tersebut menjadi tempat penampungan pengungsi. SKPD dengan *cluster* Gender bekerja sama dalam mengatasi terjadi gender di masyarakat yang terkena musibah bencana. Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten masih kurang, oleh karena adanya komunikasi yang baik dapat mengurangi terjadinya kekurangan logistik bagi masyarakat dengan saling menjalin komunikasi antar anggota di lapangan.

Berikut pemaparan MDRC Muhammadiyah;

MDRC Muhammadiyah mendirikan posko mandiri dari dana ummat muhammadiyah, dimana warga masyarakat yang terkena musibah bencana menjadi pusat pendukung dan warga jamaahnya. Semakin lamanya status bencana erupsi merapi maka MDRC Muhammadiyah mengalami masalah dana yang makin menipis.

Adanya beberapa kendala dalam mengatasi bencana erupsi merapi yaitu; (1) *Miss* komunikasi; (2) *Miss* manajemen; (3) *Miss* korupsi. Dibentuk suatu perencanaan di antaranya Rencana Aksi dan Rencana Tanggap Darurat. BNPB pada situasi erupsi merapi 2010 belum berlaku dengan baik. Pada saat bencana erupsi merapi BNPB *faktanya* hanya ikut membantu dalam koordinasi dan hanya mendampingi pemerintah pusat. Dengan terbentuknya BPBD mempermudah dalam mengatasi dan mengucurkan dana dari pemerintah pusat dan skala bencana termasuk bencana nasional atau lokal. BPBD dapat mem-

berikan keputusan dalam mengambil kebijakan berdasarkan aturan pemerintah.

Evaluasi

Model penanggulangan tanggap darurat melalui forum PRB dinilai mampu mengatasi hambatan birokrasi yang ada sehingga bisa lebih cepat dan terarah dalam mengatur, mengkoordinasi dan mendistribusi bantuan yang diperlukan korban. Alur bantuan, alur tugas dan wewenang dalam penanganan tanggap darurat melalui forum ini juga bisa lebih jelas dan cepat dilakukan.

Penanganan tanggap darurat melalui forum semacam ini masih menyimpan beberapa kelemahan. Kelemahan itu di antaranya adalah kedudukan forum ini yang masih informal terkadang masih juga tidak mampu menembus birokrasi. Meskipun dalam forum ini sudah ada perwakilan birokrasi di dalamnya namun terkadang karena kepangkatan wakil yang ada dalam forum masih tidak dapat menembus struktur birokrasi di atasnya. Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam penanganan tanggap darurat, forum juga tidak dapat berbuat banyak. Dalam kasus Merapi misalnya siapa yang akan mengganti biaya pengobatan korban yang ditangani oleh rumah sakit, rumah sakit swasta yang ada di Yogyakarta, forum tidak dapat memberi jaminan pasti. Hal yang sama juga kebijakan yang berkaitan dengan penggantian korban ternak sapi milik para korban Merapi. Pemilik ternak sapi tidak mau meninggalkan rumahnya yang terdampak oleh letusan Merapi. Mereka hanya mau pergi dari rumahnya kalau ternak sapinya diganti. Kebijakan penggantian ternak sapi jelas bukan wewenang forum tapi lebih merupakan wewenang Pemda, baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi.

Secara umum manajemen komunikasi bencana di merapi 2010 DIY sudah berjalan dengan baik, sudah ada perencanaan yaitu Rencana *Contingency*, pelaksanaan melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan media baik media massa, dari mulut ke mulut, internet, dan media tradisional. Pelaksanaan ada kekurangan dan hambatan merupakan hal yang wajar dan sudah dievaluasi untuk persiapan pembuatan rencana *contingency* yang akan datang.

Manajemen bencana yang menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional tahun 2010-2014, perlu ditanggapi dan ditangani secara serius oleh berbagai pihak, terutama pemerintah dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, seperti DI. Yogyakarta. Manajemen bencana dapat efektif apabila diperkuat dengan aspek komunikasi, karena pada dasarnya aspek manajemen sangat terkait dengan aspek komunikasi. Kedua konsep tersebut dapat bersinergi sehingga manajemen komunikasi dapat dilakukan untuk pengurangan dan penanggulangan resiko bencana.

Komunikasi penanggulangan bencana terutama pada saat tanggap darurat Merapi 2010, di Kabupaten Sleman sudah menerapkan manajemen komunikasi penanggulangan bencana yang partisipatif, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam arti komunikasi yang melibatkan seluruh warga dan komunitasnya dengan saluran komunikasi kelompok intra maupun antar RT/RW, desa, kecamatan, kabupaten atau kota hingga ke provinsi. Melalui jalinan komunikasi kelompok ini, peringatan dini bencana alam dapat segera disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga korban jiwa dan harta benda dapat diminimalisasi. Laporan terjadinya bencana, wilayah yang tertimpa dan jumlah korban, juga bisa dilakukan dalam waktu singkat ke jenjang pemerintahan yang lebih tinggi untuk segera mendapatkan penanganan dan penanggulangan secara cepat. Melalui model manajemen partisipatif ini juga mempermudah koordinasi dan penyampaian kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana. Dengan demikian komunikasi bencana lebih efektif dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal yang tersedia. Masyarakat tidak hanya dilihat sebagai objek penanggulangan bencana, tetapi mereka juga sebagai subjek yang bertanggungjawab terhadap potensi bencana di wilayahnya. Pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat terhadap bencana dapat tercipta melalui manajemen komunikasi bencana yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, terutama di daerah rawan bencana.

Manajemen partisipatif terlihat pada saat pemerintah Kabupaten Sleman memindahkan para pengungsi dari beberapa titik pengungsian ke

lokasi pengungsian yang lebih luas yaitu Stadion Maguwoharjo Sleman pada malam hari. Pemda melalui aparat-aparatnya pada malam itu juga meminta seluruh warga RT/RW dusun, desa yang ada di sekitar stadion Maguwo untuk menyediakan makan (nasi bungkus) dan minum bagi para pengungsi melalui edia HT, HP, dan informasi dari mulut ke mulut. Serentak warga masyarakat sekitar turut berpartisipasi menyebarkan informasi tersebut dan memberikan bantuan semampunya, bahkan banyak warga sekitar menjadi relawan selama ada para pengungsi.

Perubahan paradigma menghadapi bencana yang dilakukan di Kabupaten Sleman dengan membentuk lembaga penanggulangan bencana seperti yang dimanatkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), diharapkan dapat mengkoordinasi dalam pengurangan dampak bencana terutama saat tanggap darurat. Reformasi dalam manajemen dan sistem komunikasi penanggulangan bencana diharapkan terjadi di berbagai daerah, terutama daerah rawan bencana dan menjadi titik awal agar bangsa ini tidak semakin terpuruk akibat sering mengalami bencana. Pada akhirnya, penanggulangan bencana akan lebih efektif, efisien, dan mencapai tujuan. ([http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/10/komunikasi-penanggulangan-bencana/diakses tanggal 10 Mei 2012](http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/10/komunikasi-penanggulangan-bencana/diakses%20tanggal%2010%20Mei%202012)).

Selain pengorganisasian melalui pembentukan BPBD, koordinasi dan pengendalian merupakan hal yang sangat diperlukan dalam penanggulangan di lapangan, karena dengan koordinasi yang baik diharapkan menghasilkan output atau keluaran yang maksimal sesuai sumber daya yang ada meminimalkan resiko bencana, kesenjangan dan kekurangan dalam pelayanan, adanya kesesuaian pembagian tanggung jawab demi keseragaman langkah dan tercapainya standar penanggulangan bencana di lapangan yang diharapkan. Koordinasi yang baik akan menghasilkan keselarasan dan kerja sama yang efektif dari organisasi-organisasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana di lapangan. Dalam hal ini perlu diperhatikan penempatan struktur organisasi yang tepat sesuai dengan tingkat penanggulangan bencana yang berbeda, serta adanya kejelasan tugas, tanggung jawab dan otoritas dan

masing-masing komponen atau organisasi yang terus-menerus dilakukan secara lintas program dan lintas sektor mulai tahap persiapan, saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Kegiatan manajemen komunikasi bencana dalam hal pemantauan dan mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana di lapangan pada prinsipnya adalah; (a) Mengidentifikasi kebutuhan dan dampak bencana sebagai dasar untuk pemantauan dan penyusunan program mobilisasi bantuan; (b) Memobilisasi organisasi yang terkait dalam penanggulangan akibat bencana di lapangan, mempersiapkan sarana pendukung guna memaksimalkan bantuan; (c) Melakukan mobilisasi tim ke lokasi bencana dan terus menerus mengamati keadaan lingkungan dan kecenderungan perubahan-perubahan yang terjadi.

Berkaitan dengan manajemen komunikasi bencana, penulis juga mengapresiasi upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka *hot-line* telepon 24 jam dengan gubernur di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam. Hal itu sangat tepat, karena kemudahan akses komunikasi antara pusat dan daerah pascaotonomi daerah (otoda) merupakan faktor yang sangat penting bagi kelancaran proses pelaporan dan koordinasi, sehingga penanganan bencana di daerah dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Pasca otoda, daerah memang memiliki hak untuk mengatur kewenangan atas kemauan dan prakarsa sendiri, termasuk mengatur penanggulangan bencana alam. Daerah berhak membentuk tim penanggulangan sendiri, dengan pola kerja yang ditetapkan oleh masing-masing pemda. Pemda pada umumnya sudah memiliki lembaga semacam Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam (Satskorlak PBA), serta tim penolong seperti *Search and Rescue* (SAR), Palang Merah Indonesia (PMI), dan para relawan yang akan bekerja sama mengevakuasi dan menyelamatkan para korban saat terjadi bencana alam berskala kecil. Apabila bencana alam yang terjadi berskala besar—seperti tsunami di NAD, gempa di Yogyakarta, dan lain-lain keterlibatan pemerintah pusat mutlak diperlukan. Berdasarkan hal tersebut jalur telepon *hotline* 24 jam antara gubernur dan presiden diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang tepat untuk menghindari keterlambatan penangan-

an bencana. Akses langsung ke presiden akan memotong jalur birokrasi yang terkadang memakan banyak waktu. Hal ini merupakan langkah maju dalam manajemen komunikasi penanganan bencana alam yang selalu dilaksanakan dalam situasi tanggap-darurat. Dengan akses langsung tersebut, presiden dapat segera mengambil keputusan untuk mengoordinasikan tindakan terkait dengan penanganan bencana alam yang akan, sedang maupun telah terjadi di daerah (<http://bacatanda.wordpress.com/2008/01/16/pentingnya-komunikasi-bencana-alam/> diakses tanggal 10 Mei 2012).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kab upaten Sleman DIY untuk menyelamatkan korban sudah semaksimal mungkin guna menekan jumlah korban, namun berbagai persoalan di lapangan juga menjadi kendala dalam manajemen komunikasi bencana Merapi 2010, yaitu antara lain; (1) Prediksi letusan dan jumlah korban dalam perencanaan kontijensi tidak sampai sejauh 20 km, dan korban pengungsi yang diprediksikan juga tidak sebanyak ini (50.000an pengungsi); (2) Keadaan korban yang sudah terbakar oleh awan panas Merapi menyebabkan sulitnya pelaksanaan evakuasi dan identifikasi; (3) Letak geografi dan lokasi bencana yang terdiri dari tiga Kabupaten yaitu Sleman DIY, Magelang dan Klaten Jawa Tengah, menyulitkan pelaksanaan identifikasi warga yang mengungsi (banyak yang lintas kabupaten); (4) Banyaknya lokasi pengungsian yang terpencar-pencar dan distribusi bantuan yang kurang merata, di suatu lokasi bantuan melimpah, namun di lokasi lainnya masih kurang; (5) Gangguan keamanan terjadi pada saat para pengungsi meninggalkan rumah dan tinggal di pengungsian, banyak hewan dan harta benda lain dicuri oleh orang yang pura-pura menjadi relawan dan membantu mengevakuasi korban ternak; (6) Komunikasi tradisional berupa kepercayaan kepada satu tokoh yaitu juru kunci Merapi (Mbah Marijan) menyebabkan korban enggan mengungsi sebelum Mbah Marijan (almarhum) memberikan instruksi mengungsi; (7) Adanya kepentingan politik tertentu oleh para pendonor atau pun relawan, baik dari partai politik maupun organisasi-organisasi swasta lainnya; (8) Adanya media massa yang memberitakan kondisi Merapi terlalu berlebihan, mem-

buat masyarakat semakin panik dan banyak yang ke luar meninggalkan Yogyakarta.

Berbagai kendala tersebut sudah dievaluasi oleh Pemda bekerja sama dengan BNPB, BPBD, FPRB, pengelola media, bahkan Sultan sempat meminta KPI untuk mengatasi persoalan pemberitaan di televisi swasta nasional yang meresahkan warga Yogyakarta tersebut (FGD, 26 Juli 2012).

Manajemen Komunikasi Bencana Berbasis Komunitas

Manajemen komunikasi bencana saat tanggap darurat Merapi 2010 sudah berjalan baik yaitu menggunakan manajemen komunikasi bencana berbasis komunitas. Terbukti ditemukan di lapangan bahwa sejumlah komunitas dan warga sekitar gunung Merapi membangun sistem informasi swadaya. Komunitas-komunitas yang terlibat saat tanggap darurat Merapi antara lain; Sigap Merapi, Peduli Merapi, Kompag Merapi, Guruh Merapi, LSC, JME, Kompas, Tagar, MDMC, Obaloka Pramuka, GP Ansor, KLM, KSB, Lahara, Carina KAS, dan lainnya. Terdapat banyak komunitas relawan yang bekerja pada saat tanggap darurat Merapi dan membentuk posko terpadu, di samping ada posko per komunitas. Posko terpadu ini berfungsi sebagai pusat komando penanggulangan bencana Merapi 2010. Tim ini didukung oleh anggota TNI dan Polri selama bertugas.

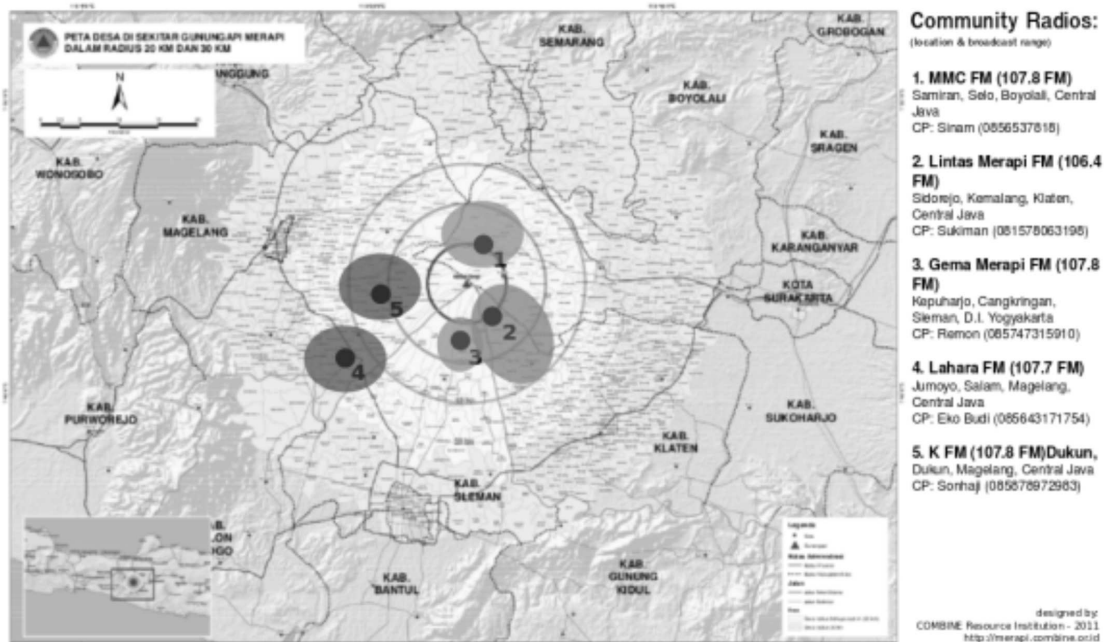
Salah satu lembaga yang mengelola sistem informasi saat tanggap darurat yaitu Jalin Merapi. Sistem informasi yang dibangun Jalin Merapi sudah tertata. Data yang dipublikasikan lembaga itu cukup detail dan bisa dipertanggungjawabkan (penulis menjadi anggota *group* di *mil-list* Jalin Merapi dan menerima pesan-pesan atau segala informasi tentang Merapi). Pernyataan penulis juga dikuatkan oleh salah satu pendonor yang tidak mau disebut namanya, bahwa pada saat kami mau memberi bantuan di Merapi, kami memperoleh data yang lumayan detail dari Jalin Merapi, sehingga bantuan yang kami siapkan sesuai dengan kondisi di lapangan (wawancara, NN, Juli 2012). Menurut koordinator Media Center Jalin Merapi Ahmad Nasir (wawancara, 2011) menyatakan, sistem informasi yang dibangun

lembaganya memanfaatkan berbagai alat komunikasi, seperti; kentongan, pengeras suara di Masjid, radio *handy talkie*, *handphone*, *website*, hingga media sosial. Jalin Merapi berupaya menggunakan alat komunikasi sebanyak-banyaknya karena pihak yang terlibat dalam sistem tersebut juga banyak. Semua alat komunikasi itu kemudian dihubungkan dalam sistem yang dikelola bersama. Sistem informasi yang dibangun Jalin Merapi bisa berjalan karena sudah disiapkan sebelumnya.

Menurut Elanto Wijoyono (<http://merapi.combine.or.id/baca/13359/manajemen-informasi-jalin-merapi.html>-diakses 30 Okt 2011) bahwa; Sejak didirikan tahun 2006, gerakan Jalin Merapi mencoba menguatkan wawasan masyarakat setempat di Merapi tentang Merapi dengan media radio siaran komunitas. Jalin Merapi dipelopori oleh tiga radio siaran komunitas, yakni Radio Komunitas Lintas Merapi FM (Deles, Sidorejo, Klaten), Radio Komunitas K FM (Dukun, Magelang), dan Radio Komunitas MMC FM (Selo, Boyolali). Ketiga radio siaran komunitas itu dikelola warga untuk siarkan hiburan dan info ke warga lokal Merapi sejak awal dekade 2000-an. Pada erupsi 2006, para pegiat radio siaran komunitas ini resah dengan pemberitaan media massa tentang Merapi yang tidak berimbang, sehingga merasa perlu bergerak. Media massa saat erupsi 2006 lebih fokus pada dramatisasi informasi fisik Gunung Merapi dan Sleman. Aspek dan wilayah lain tidak terliput utuh. Ketiga radio siaran komunitas berinisiatif mengajak beberapa kelompok untuk membangun jejaring informasi alternatif yang bisa memberi perspektif yang berbeda dan utuh tentang Merapi. Bersama beberapa kelompok dan organisasi di Yogyakarta, Solo, Boyolali, dan Magelang, sebuah sistem informasi alternatif tentang Merapi dibangun pada 2006.

Jejaring ini menggunakan banyak media untuk berbagi informasi tentang Merapi, meliputi informasi dari luar untuk warga Merapi dan informasi seputar Merapi untuk publik di luar lingkaran Merapi. Sejak tahun 2006, Jalin Merapi menggunakan HT, telepon, SMS, dan internet untuk berbagi informasi Merapi. Website <http://>

Community Radios Network of JALIN MERAPI Central Java Province & Yogyakarta Special Region Province



Gambar 5. Jaringan Radio Komunitas Jalin Merapi

(sumber: <http://merapi.combine.or.id/baca/13359/manajemen-informasi-jalin-merapi.html>-diakses 30 Okt 2011).

merapi.combine.or.id sebagai muaranya. Proses tersebut dilakukan terus hingga erupsi 2010 dan hingga kini, mengelola informasi lokal untuk warga Merapi dan juga untuk publik luas. Dalam manajemen informasi ini, Jalin Merapi memantau beragam media, termasuk telekomunikasi dgn gelombang radio VHF-HF yang dikelola beberapa kelompok di Merapi. Informasi dari berbagai sumber itu kemudian diteruskan ke warga melalui radio siaran dan pengeras suara; diteruskan ke publik luas melalui internet dan media jejaring sosial. Lalu lintas data dan permintaan informasi dari publik pada saat erupsi 2010 dan berlanjut pada kejadian banjir lahar selama 2011 beri gagasan pada tim Jalin Merapi untuk memasang *online streaming* di website Jalin Merapi. Tim Jalin Merapi di Yogyakarta (@combineri) lalu memasang *online streaming* komunikasi radio dari beberapa kelompok yang berbicara soal Merapi di website. Selain *online streaming* dari komunikasi radio, Jalin Merapi juga memasang tampilan CCTV Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungpian (BPPTK) Yogyakarta di website. Jadi, beberapa media rujukan diakses dan dipasang Jalin Merapi untuk memudahkan penyebaran informasi tentang Merapi ke publik.

Sebagai jembatan informasi, Jalin Merapi tak bisa kontrol isi informasi dalam komunikasi radio VHF-HF yang ditampilkan sebagai *on line streaming*. Padahal, keakuratan informasi sangat penting. Saat ini Jalin Merapi sedang menganalisis jaringan komunikasi radio VHF-HF mana yang layak dijadikan rujukan informasi tentang Merapi. Keputusan belum difinalisasi. Kriteria komunikasi radio VHF-HF yang akan dijadikan rujukan informasi Jalin Merapi adalah yang kompeten dengan isu Merapi, berisi informasi akurat, dan selalu menyebutkan sumber informasi yang jelas. Komunikasi dengan gelombang radio di Merapi yang akan dirujuk adalah komunikasi yang diakui warga Merapi dan memenuhi aspek legal formal. Tim Jalin Merapi menerima masukan dari pembaca, media apa saja (termasuk komunikasi radio mana saja) yang bisa dijadikan rujukan informasi tentang Merapi. Jadi, Jalin Merapi saat ini tidak berposisi sebagai operator komunikasi radio, tetapi sebagai pemantau atau pengakses konten, yang lalu membantu meneruskan ke publik.

Jaringan radio komunitas Jalin Merapi ditunjukkan melalui gambar 5.

Dengan demikian, saat masa tanggap darurat semua orang tinggal bekerja tanpa harus

berpikir lagi. Sistem informasi itu juga berupaya melayani semua pihak berkait bencana (misalnya para korban, pemerintah, pendonor, relawan. Mengingat hal itu, maka harus ada pemetaan sebelum bencana (tahap perencanaan) siapa saja yang kira-kira akan menjadi korban bencana.

Simpulan

Manajemen komunikasi penanggulangan bencana Merapi 2010 menggunakan manajemen komunikasi partisipatif, pada prinsipnya sudah sesuai dengan ketentuan UU Penanggulangan Bencana Pasal 33 huruf b yaitu Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: (1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; (2) Penentuan status keadaan darurat bencana; (3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (4) Pemenuhan kebutuhan dasar; (5) Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan (6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pada tahap penilaian kondisi darurat sudah dilakukan suatu proses komunikasi kelompok yaitu mengumpulkan informasi atau data secara sistematis dengan manajemen komunikasi partisipatif oleh warga RT/RW, dukuh, desa, kecamatan, kabupaten, selanjutnya petugas menganalisis situasi untuk menentukan dan menilai kondisi-kondisi korban apakah rusak ringan, sedang, atau berat serta jumlah yang meninggal, sakit parah, ringan, dan sebagainya. Pada tahap ini dilakukan proses komunikasi antara petugas dengan masyarakat korban di lokasi bencana, komunikasi dengan aparat pemerintah setempat, dan pihak-pihak terkait untuk melakukan monitoring dan refleksi yang berlangsung terus-menerus guna membantu perencanaan program yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat korban.

Berbagai upaya telah ditempuh, namun masih terdapat beberapa kendala manajemen komunikasi bencana, seperti adanya komunikasi tradisional (kepercayaan masyarakat pada figure almarhum Mbah Marijan), adanya informasi dari media massa yang justru meresahkan masyarakat,

adanya kepentingan politik para pendonor atau relawan, dan lain-lain.

Berbagai kendala tersebut sudah dievaluasi oleh PEMDA bersama BNPB, BPBD, TNI, LSM, dan semua pihak yang peduli Merapi 2010, serta lembaga-lembaga yang tergabung dalam Forum Penanggulangan Resiko Bencana DIY.

Penelitian ini mengapresiasi manajemen komunikasi bencana Merapi 2010 yang sudah dilakukan dengan baik oleh pemda dan masyarakat di DIY, dan merekomendasikan bahwa berbagai kendala tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi oleh pemda melalui berbagai forum, seperti forum rapat BNPB, FPRB, seminar di beberapa kampus, berbagai penelitian dosen dan mahasiswa di berbagai pusat studi dan lembaga penelitian, serta dijadikan bahan untuk perencanaan berikutnya.

Manajemen komunikasi bencana adalah aktivitas pengelolaan komunikasi atau koordinasi yang dapat mengurangi resiko bencana atau memperkecil tingkat kerentanan dan bahaya akibat bencana. Manajemen komunikasi bencana merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah bersama-sama masyarakat, dalam mewujudkan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat beserta aset-asetnya dari kemungkinan terjadinya bencana. Bagi para pengambil keputusan, baik pemerintah pusat, daerah, pakar bencana alam dan masyarakat, diharapkan semakin meningkatkan komunikasi agar pelaksanaan manajemen bencana sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasional dapat terwujud dengan baik di berbagai daerah di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang telah memberi dana penelitian melalui skema Penelitian Hibah Kompetitif Strategis Nasional Tahun 2012 yang menjadi dasar bagi penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dekan FISIP, ketua dan staf Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN "Veteran" Yogyakarta, pengurus dan anggota Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) DIY, serta peserta FGD "Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 di DIY. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu penelitian ini termasuk beberapa Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dan Teknik Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Aditya, Barry, dkk., 2009, *Kesiapan dan Kesiagaan Bencana (Manual untuk Aktivis Persyarikatan)*, Penerbit Risalah MDMC, Jakarta.
- Arif, Ahmad, 2010, *Jurnalisme Bencana Bencana Jurnalisme Kesaksian dari Tanah Bencana*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Tembi, Tifa, dan LSPP, Jakarta.
- Asmadi, 2 Desember 2010, Manajemen Penanganan Kasus Bencana, *Makalah* seminar PWI Yogyakarta bekerjasama dengan UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Badan Informasi Publik, Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, 2008, *Memahami Bencana, Informasi Tindakan Masyarakat Mengurangi Resiko Bencana*, Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta.
- Badri, Muhammad, 2008, "Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi di Yogyakarta (Kasus Kabupaten Bantul)", *Tesis* Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- BNPB dan Bappenas, 2011, Ringkasan Eksekutif Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah, Tahun 2011-2013. <http://bencana.bappenas.go.id/imdff/renaksi-merapi>, diakses tanggal 9 Mei 2012.
- Elanto, Wijoyono, 2011, <http://merapi.combine.or.id/baca/13359/manajemen-informasi-jalin-merapi.html>-diakses 30 Okt 2011.
- FGD (Focus Group Discussion) tanggal 26 Juli 2012, *Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010*, Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB), Yogyakarta.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, 19 Juli 2012, Peran Pemerintah dalam Penanggulangan bencana Merapi, *Makalah Keynote Speech* pada seminar "Merapi dalam Kajian Multidisiplin, Sumbangan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bagi Korban Erupsi Merapi tahun 2010", Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Hidayat, Rahmat, 2012, *Representasi Sosial tentang Bencana Alam pada Masyarakat Yogyakarta*, bagian dari buku *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana*, editor Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono, Penerbit Mizan Bandung kerjasama dengan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta.
- <http://bacatanda.wordpress.com/2008/01/16/pentingnya-komunikasi-bencana-alam/> diakses tanggal 10 Mei 2012.
- <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/10/komunikasi-penanggulangan-bencana/> diakses tanggal 10 Mei 2012.
- Junaedi, Fajar, 2011, *Manajemen Penyiaran Berita Bencana*, bagian dari buku *Komunikasi Bencana*, editor Setio Budi HH, Penerbit Buku Litera kerjasama dengan ASPIKOM dan Perhumas, Yogyakarta.
- Lestari, Puji, 2007, Manajemen Komunikasi Bencana di Daerah Rawan Bencana (Studi pada bencana gempa bumi di Kecamatan Gantiwarno Klaten), *Jurnal Ilmu Komunikasi Terakreditasi UPN "Veteran" Yogyakarta*, Volume 5, Nomor 3, September-Desember 2007.
- Lestari, Puji, Susilastuti, dan Retno Hendariningrum, 2009, Manajemen Konflik berbasis Budaya Lokal sebagai Upaya Meningkatkan Jati Diri Bangsa Indonesia, *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI)*, Volume I nomor 1, Oktober 2009.
- Nugroho, Heru, 2008, *Bencana Alam dalam Perspektif Sosio Kultural Menuju Politik*

- Bumi yang Melestarikan Lingkungan, *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, Edisi 1 / Juni / Tahun II / 2008, penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Noviani, Ratna, 2012, *Bencana dalam Narasi Media; Kajian Naratif Berita tentang Erupsi Merapi 2010 dalam Program Breaking News di Metro TV*, dalam buku *Merapi dalam Kajian Multidisiplin*, Editor: Hasse, dkk., Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Paripurno, Eko Teguh, 2008, *Manajemen Resiko Bencana Berbasis Komunitas: Alternatif Dari Bawah*, *Jurnal Dialog Kebijakan Publik* Edisi 1 Juni, Tahun II, 2008, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Purnomo, Sigit, 2011, *Membangun tanggap bencana melalui radio HT*, http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/11/111101_merapitanggapbencana.shtml?mid=51 diakses 12 Mei 2012.
- Ramli, Soehatman, 2010, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- Rizki, Aditya, 30 Mei 2011, *Keampuhan Jejaring Informasi dan Sosial dalam Menghadapi Bencana di Indonesia*, Opini, <http://teknologi.kompasiana.com/internet/2011/05/30/keampuhan-jejaring-informasi-dan-sosial-dalam-menghadapi-bencana-di-indonesia/?mid=54> diakses 21 Juni 2012.
- Sucahyo, Nurhadi, 2010, "Saptuari Sugiharto: Galang Bantuan Merapi lewat Facebook dan Twitter". <http://www.voanews.com/indonesian/news/Facebook-dan-Twitter-Media-Penggalangan-Bantuan-Bencana-110891989.html>, diakses tanggal 21 Juni 2012.
- Suparyo, Yossy, 2010, "Jalin Merapi Olah Data dengan Open Source". <http://combine.or.id/2010/11/jalin-merapi-olah-data-korban-merapi-dengan-open-source/>, diakses tanggal 21 Juni 2012.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Dokumen DPR RI, <http://www.dpr.go.id>, Akses 27 Desember 2010.
- UNDP, 1992, *Tinjauan Umum Manajemen Bencana, Modul Pelatihan Manajemen Bencana UNDP/UNDRO*, Jakarta.